

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia adalah menurunkan angka stunting secepat mungkin. program prioritas nasional melalui berbagai kebijakan dan program intervensi yang melibatkan berbagai sektor. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan kebersihan lingkungan, menyediakan air bersih, mendidik masyarakat tentang gizi, dan memperkuat peran pemerintah daerah dan desa merupakan bagian dari pendekatan terpadu untuk mengelola stunting. Pemerintah, tenaga medis, kader pos kesehatan terpadu (Posyandu), sektor bisnis, dan masyarakat hanyalah beberapa pemangku kepentingan yang partisipasinya sangat penting untuk keberhasilan program dalam mengurangi stunting. Untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif, stunting harus ditangani secara komprehensif dan jangka panjang.

Bagi pemerintah Indonesia, Stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang besar. Ketika Malnutrisi kronis berlangsung dalam jangka waktu yang lama, terutama sepanjang 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari pembuahan hingga usia dua tahun, anak-anak mengalami stunting, suatu kondisi kegagalan pertumbuhan ditandai dengan tinggi badan yang berada di bawah rata-rata untuk kelompok usianya mereka. Kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak ditentukan selama tahap kritis ini. Risiko stunting akan meningkat dan memengaruhi kesehatan jangka panjang anak jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi secara memadai selama periode ini (UNICEF Indonesia & Bappenas, 2024).

Salah satu program prioritas nasional pemerintah Indonesia adalah mempercepat penurunan stunting. Pemerintah mendorong partisipasi berbagai sektor dalam inisiatif untuk menurunkan prevalensi stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui Strategi Nasional Percepatan Pengurangan Stunting. Kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilannya (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024). Akibatnya, pemerintah masih berupaya menurunkan prevalensi stunting melalui program-program yang terfokus, terukur, dan berkelanjutan. Untuk menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan terbaik bagi anak-anak, komitmen ini dilaksanakan melalui sejumlah inisiatif melibatkan berbagai kelompok masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah federal.

Karena dipengaruhi oleh sejumlah variabel, termasuk masalah kesehatan ibu dan anak, sanitasi lingkungan, akses terhadap layanan kesehatan, pencapaian pendidikan, kondisi sosial ekonomi keluarga, dan gaya pengasuhan, stunting ini adalah masalah yang rumit. Oleh karena itu, upaya-upaya memerangi stunting memerlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, tenaga medis, sektor korporasi, lembaga akademik, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas (Fardianti & Bintari, 2024).

Menurut Emerson dan Nabatchi (2015), Untuk mencapai tujuan bersama, organisasi pemerintah dan non-pemerintah bekerja sama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik, Proses ini dikenal sebagai tata kelola kolaboratif. Berdasarkan posisi dan kapasitas masing-masing, setiap aktor dalam

konsep ini memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kebijakan. Komunikasi yang efektif, saling percaya, dedikasi terhadap tujuan bersama, dan koordinasi berkelanjutan merupakan faktor kunci keberhasilan *collaborative governance*. Untuk mengatasi berbagai masalah publik, pendekatan *collaborative governance* tidak hanya menyoroti pentingnya kerja sama antar organisasi tetapi juga mendorong pengembangan tata kelola yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Emerson dan Nabatchi (2015) menegaskan bahwa motivasi bersama (*shared motivation*), kemampuan untuk bekerja sama (*capacity for joint action*), dan keterlibatan yang berlandaskan prinsip (*principled engagement*) merupakan fondasi tata kelola kolaboratif. Ketiga unsur tersebut berperan sebagai komponen vital dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang efisien untuk mengatasi berbagai persoalan publik, termasuk masalah *stunting*.

Menurut penelitian Sofyan, Fauziyah, dan Rahardian (2024), *collaborative governance* sangat penting untuk memerangi *stunting* karena meningkatkan kerja sama antar lembaga, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Menurut temuan penelitian tersebut, inisiatif pengurangan *stunting* memiliki kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi ketika para pemangku kepentingan bekerja sama secara lebih efektif.

Dengan meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan komitmen bersama di antara para pemangku kepentingan, *collaborative governance* dapat meningkatkan efektivitas program pengurangan *stunting*, menurut penelitian lain oleh Sumanti (2024). Kerja sama yang efektif memungkinkan setiap mitra untuk melaksanakan

tugas dan tanggung jawab mereka sebaik mungkin, yang membantu program mencapai tujuannya. Namun, masih ada sejumlah kendala yang harus diatasi ketika menerapkan *collaborative governance* dalam inisiatif untuk mempercepat penurunan stunting. Beberapa wilayah masih menghadapi tantangan seperti koordinasi antarlembaga yang buruk, sumber daya yang terbatas, keterlibatan masyarakat yang tidak memadai, dan sistem penilaian program yang tidak efisien (Sapri, Mardhatillah, & Ramlan, 2026).

Sebagai bagian dari upaya mempromosikan program nasional pengurangan stunting, Desa Pangke Barat di Kabupaten Karimun merupakan salah satu komunitas yang melaksanakan program percepatan pengurangan stunting. Pemerintah desa bekerja sama dengan Puskesmas, kader Posyandu (Pos Kesehatan Terpadu), Tim Gerakan Kesejahteraan Keluarga (PKK), konselor keluarga, dan masyarakat setempat untuk melaksanakannya. Kerja sama ini dimungkinkan berkat sejumlah inisiatif yang berupaya mendorong pilihan gaya hidup yang higienis dan menyehatkan, mendukung kebutuhan gizi keluarga, dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Partisipasi berbagai aktor ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan program secara optimal, pengelolaan stunting memerlukan strategi terpadu dan lintas sektoral.

Di Desa Pangke Barat, sejumlah inisiatif telah diterapkan untuk membantu mempercepat pengurangan stunting. Inisiatif-inisiatif ini meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita melalui kegiatan Posyandu bulanan, Memberikan makanan tambahan (PMT) kepada anak-anak yang berisiko mengalami stunting, menawarkan konseling gizi kepada ibu hamil dan ibu balita,

serta mendidik orang tua tentang teknik pengasuhan anak yang sehat. Selain itu, dengan membangun fasilitas menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih yang memadai, pemerintah desa berupaya meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan. Sebagai contoh, berdasarkan data desa Pangke Barat mengalami kenaikan prevalensi *stunting* sebesar 2,3% dari 5,7% menjadi 8,0%. Berikut data perbandingan prevalensi *Stunting* di setiap desa yang ada di Kecamatan Meral Barat selama periode 2023-2026 .

Tabel 1. 1 Prevalensi Stunting per Desa di Kecamatan Meral Barat

No.	Desa/Kelurahan	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
1	Pasir Panjang	10,3	6,8	7,2	7,6
2	Pangke	11,7	10,4	7,5	5,9
3	Darussalam	1,7	1,8	6,1	5,1
4	Pangke Barat	8,0	2,0	6,1	7,0

Sumber Data: Puskesmas Meral Barat (Telah Diolah Kembali,2026)

Data prevalensi stunting di Kecamatan Meral Barat periode 2023–2026 menunjukkan tren yang fluktuatif dan tidak merata antar desa. Pada 2023, Desa Pangke mencatat prevalensi tertinggi (11,7%), disusul Pasir Panjang (10,3%), Pangke Barat (8%), dan Darussalam (1,7%). Tahun 2024 secara umum menunjukkan perbaikan: Pangke Barat turun tajam ke 2% (6 poin), Pasir Panjang ke 6,8%, dan Pangke ke 10,4%, sementara Darussalam sedikit naik ke 1,8%. Namun tren positif ini tidak bertahan pada 2025, Darussalam dan Pangke Barat justru melonjak ke 6,1%, sedangkan Pangke turun ke 7,5% dan Pasir Panjang naik tipis ke 7,2%. Pada 2026, angka kembali berbalik: Pasir Panjang naik ke 7,6%, Pangke

Barat naik ke 7%, sementara Pangke dan Darussalam justru turun (5,9% dan 5,1%). Secara keseluruhan, Desa Pangke Barat sempat mencatat penurunan paling signifikan (2024) tetapi kembali meningkat dua tahun berikutnya hingga 7% pada 2026 menunjukkan bahwa keberhasilan program penurunan stunting di desa ini bersifat sementara dan belum stabil secara berkelanjutan.

Berdasarkan data di atas, meskipun sejumlah program telah dilaksanakan, efektivitas percepatan pengurangan stunting di Desa Pangke Barat sebagian besar bergantung pada seberapa baik pihak-pihak yang terlibat berkolaborasi. Pada kenyataannya, masih terdapat sejumlah masalah, termasuk koordinasi kelembagaan yang buruk, tingkat keterlibatan masyarakat yang beragam, dan sedikitnya sumber daya bagi setiap peserta. Misalnya, hanya sekitar tiga dari lima kader Posyandu (Pos Kesehatan Terpadu) yang terdaftar secara rutin terlibat dalam semua kegiatan dukungan keluarga (contoh data). Selain itu, tingkat kehadiran masyarakat pada kegiatan penyuluhan gizi juga belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu hanya sekitar 70% dari total sasaran keluarga berisiko *stunting*. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemampuan para pemangku kepentingan untuk membina koordinasi, komunikasi, dan komitmen bersama sama pentingnya dengan kuantitas kegiatan yang dilakukan terhadap efektivitas program. Untuk memastikan sejauh mana kerja sama berhasil membantu pencapaian tujuan program, sangat penting untuk menilai penggunaan *collaborative governance* dalam mempercepat penurunan stunting di Desa Pangke Barat.

Mengingat keadaan tersebut, diperlukan penelitian untuk memastikan sejauh mana *collaborative governance* memengaruhi efektivitas program

percepatan penurunan stunting di Desa Pangke Barat Kabupaten Karimun. Penelitian ini penting karena temuannya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi pemangku kepentingan dan bagaimana hal itu memengaruhi efektivitas program percepatan pengurangan stunting.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana *collaborative governance* memengaruhi efektivitas program percepatan penurunan *stunting* di Desa Pangke Barat Kabupaten Karimun, Penelitian ini penting dilakukan karena hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas kolaborasi antar stakeholder serta kontribusinya terhadap keberhasilan program percepatan penurunan *stunting*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “apakah terdapat pengaruh *collaborative governance* terhadap efektivitas program percepatan penurunan *stunting* di Desa Pangke Barat Kabupaten Karimun?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat disusun untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *collaborative governance* terhadap efektivitas program percepatan penurunan *stunting* di Desa Pangke Barat Kabupaten Karimun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini secara teoritis akan meningkatkan pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara berkaitan dengan gagasan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan program publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa Pangke Barat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Desa Pangke Barat dalam meningkatkan kualitas kolaborasi dengan berbagai aktor yang terlibat dalam program percepatan penurunan *stunting*. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pemerintah desa dalam mengembangkan rencana yang lebih sukses untuk meningkatkan kerja sama, komunikasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Karimun

Diharapkan bahwa penelitian ini akan dipertimbangkan untuk Pemerintah Kabupaten Karimun dalam menyusun kebijakan dan program yang mendukung percepatan penurunan *stunting*. Temuan studi ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pola kerja sama lintas sektoral guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pengelolaan *stunting* di tingkat desa dan kecamatan.

c. Bagi Instansi dan *Stakeholder* Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pentingnya penerapan *collaborative governance* dalam pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), kader Posyandu (Puskesmas), Tim Gerakan Kesejahteraan Keluarga (PKK),

advokat keluarga, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai alat penilaian untuk meningkatkan peran dan kontribusi masing-masing terhadap keberhasilan program.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dan partisipasi dalam inisiatif untuk mempercepat pengurangan stunting. Diharapkan inisiatif pencegahan dan pengendalian stunting akan lebih berhasil dengan keterlibatan aktif masyarakat, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

e. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman, keahlian, dan pengalaman para peneliti dalam menggunakan teori dan teknik penelitian di bidang administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan *collaborative governance* dan efektivitas inisiatif publik. Selain itu, penelitian ini merupakan cara untuk mengasah kemampuan analitis dalam analisis metodis dan ilmiah terhadap masalah publik.